





INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDARJO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

 JL. UNTUNG SUROPATI NOMOR 10

 @INSPEKTORATSIDARJO

 (031) 8948163

 (031) 99010187

 INSPEKTORATDAERAH.SIDARJOKAB.GO.ID

 INSPEKTORAT@SIDARJOKAB.GO.ID

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 13 Februari 2025

TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ATOK IRAWAN, Sp.P., M.Kes.
NIP. 196605011996021001

dr. ATOK IRAWAN, Sp.P, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 196605011996021001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders*, tanggapan (*feedback*), serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 3 Februari 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Aspek Strategis Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Srategis Tahun 2021-2026.....	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	6
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2024.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Pengukuran Kinerja.....	7
B. Realisasi Kinerja Anggaran.....	18
C. Inovasi Tahun 2024.....	21
BAB IV PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut	25
LAMPIRAN	27



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	2
Tabel 1. 2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah	3
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026.....	5
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	6
Tabel 2. 3 Rincian Anggaran Tahun 2024	6
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	7
Tabel 3.2 Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026	8
Tabel 3.3 Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2022-2024	9
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP dengan Kabupaten/Kota Lain Tahun 2024	11
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP dengan Target Nasional Tahun 2024 ..	11
Tabel 3.6 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 terhadap target jangka menengah.....	11
Tabel 3.7 Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022-2024	12
Tabel 3.8 Capaian Nilai IPP Tahun 2024 terhadap target jangka menengah.....	14
Tabel 3.9 Realisasi Nilai IPP Tahun 2022-2024.....	14
Tabel 3.10 Capaian Nilai SKM Tahun 2024 terhadap target jangka menengah.....	16
Tabel 3.11 Realisasi Nilai SKM Tahun 2022-2024	16
Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	18
Tabel 3.13 Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja	19
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Tahun 2024	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Gambar Struktur Organisasi.....	1
Gambar 3. 1 Tren Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2022-2024.....	9
Gambar 3. 2 Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022-2024.....	12
Gambar 3. 3 Tren Realisasi Nilai IPP Tahun 2022-2024.....	14
Gambar 3. 4 Tren Realisasi Nilai SKM Tahun 2022-2024.....	16
Gambar 3. 5 Aplikasi E-Consulting.....	21
Gambar 3. 6 Aplikasi POLAR.....	22
Gambar 3. 7 Aplikasi E-WBS.....	23
Gambar 3. 8 Aplikasi SIAP.....	24



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja **Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo** Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2024. Kami memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 (tiga) indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 (satu) indikator;

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Integrated level 3 (3,00)	Integrated level 3 (3,00)	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,60 (A)	88,22 (A)	104,28%	Sangat Baik
		Nilai IPP	4,07 (A-)	4,083 (A-)	100,31%	Sangat Baik
		Nilai SKM	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (97,04)	106,64%	Sangat Baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

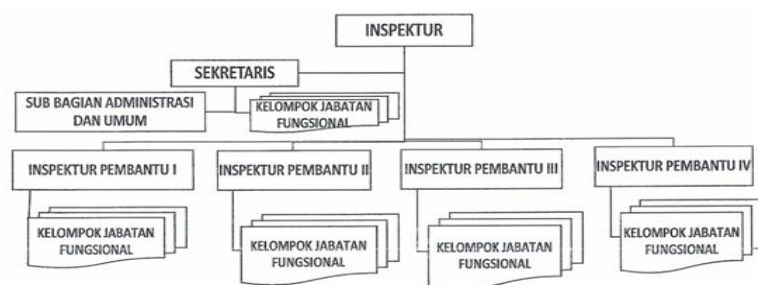
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas **“Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa”**. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Inspektur Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

Gambar 1. 1
Gambar Struktur Organisasi



Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 74 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, data ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024.

Tabel 1. 1

Data ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Existing
1	Inspektur	1	1
2	Sekretaris	1	0
3	Inspektur Pembantu	4	2
4	Kepala Sub Bagian	1	1
5	Pengadministrasi Perkantoran	2	2
6	Pengelola Layanan Operasional	1	1
7	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2
8	Operator Layanan Operasional	11	5
9	Pengolah Data dan Informasi	6	6
10	Pranata Komputer Terampil	1	1
11	Auditor Madya	7	7
12	Auditor Muda	12	12
13	Auditor Pertama	9	9
14	Auditor Mahir	3	3
15	Auditor Terampil	19	19
16	Perencana Ahli Muda	1	1
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1
18	Arsiparis Mahir	1	1
	Jumlah	83	74

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut

pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kualitas identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko pada Perangkat Daerah kurang maksimal	<p>Efektivitas pengendalian risiko belum maksimal</p> <p>Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku</p> <p>Peningkatan kinerja operasional perlu dioptimalkan</p> <p>Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik</p> <p>Kurangnya pemanfaatan teknologi dan inovasi</p>	<p>Komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko belum optimal</p>
2	Kurangnya kesadaran pentingnya perilaku Anti-Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	<p>Adanya penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi</p> <p>Adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, dan sejenisnya</p> <p>Adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai dengan regulasi</p> <p>Masih adanya praktik jual beli jabatan, suap, gratifikasi, serta <i>trading in influence</i></p> <p>Risiko yang cukup tinggi pada aktivitas PBJ, seperti</p>	<p>a. Komitmen dan teladan pimpinan terhadap pencegahan korupsi belum optimal</p> <p>b. Komitmen seluruh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo terkait anti-korupsi belum maksimal</p>



		pengaturan tender hingga suap dari vendor	
		Kurangnya sosialisasi terkait anti-korupsi terhadap pegawai pemerintahan dan masyarakat	

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal pada tingkat OPD; serta
2. Perlunya peningkatan kesadaran pentingnya perilaku anti-korupsi bagi instansi pemerintah dan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif		Maturitas SPIP	Terdefisiensi	Terdefisiensi	Terdefisiensi	Terdefisiensi	Terdefisiensi	Terdefisiensi
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	n/a	n/a	82	82,5	83	83,5
	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Infrast</i> <i>ructure</i>	<i>Infrast</i> <i>ructure</i>	<i>Integra</i> <i>ted</i>	<i>Integra</i> <i>ted</i>	<i>Integra</i> <i>ted</i>	<i>Integra</i> <i>ted</i>
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara	Nilai SAKIP	n/a	A (84,47)	A (84,50)	A (84,60)	A (88,03)	A (88,25)
		Nilai RB	n/a	36,12	-	-	-	-

	an Pemerintahan	Nilai IPP	n/a	A- (4,04)	A- (4,05)	A- (4,07)	A- (4,09)	A- (4,10)
		Nilai SKM	n/a	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (90,00)	Sangat Baik (91,00)	Sangat Baik (96,44)	Sangat Baik (97,00)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,60 (A)
		Nilai IPP	4,07 (A-)
		Nilai SKM	Sangat Baik (91,00)

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 17.517.072.107. Anggaran ini mengalami perubahan di akhir tahun 2024 dari Rp. 17.517.072.107 menjadi Rp. 20.477.608.955. Perubahan ini untuk menyesuaikan dinamika dalam pencapaian target kinerja. Adapun rincian anggaran sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024 diuraikan pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3

Rincian Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.414.239.603	Rp. 19.422.686.451
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.102.832.504	Rp. 1.054.922.504
	Jumlah	Rp. 17.517.072.107	Rp. 20.477.608.955

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja dan didukung dengan data-data yang relevan dan handal. Data relevan dan handal sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur kualitas akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target yang terhubung dalam Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)	Ket.
1	Terlaksananya Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated level</i>	100%	<i>Integrated</i>	100%	



	san yang Efektif Berbasis Risiko		level 3 (3,00)	3 (3,00)				
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,60 (A)	88,22 (A)	104,28%	84,80 (A)	104%	
		Nilai IPP	4,07 (A-)	4,083 (A-)	100,31%	4,10 (A-)	99,58%	
		Nilai SKM	Sangat Baik (91,00)	Sangat Baik (97,04)	106,64%	Sangat Baik (93,00)	104,34%	

Sasaran 1 : Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko

Indikator Kinerja : Tingkat Kapabilitas APIP

Tabel 3. 2

Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)	Ket.
<i>Integrated</i> level 3 (3,00)	<i>Integrated</i> level 3 (3,00)	100%	<i>Integrated</i>	100%	

Capaian indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi *integrated* (level 3) dari target *integrated* (level 3). Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target *Integrated*, maka pada tahun 2024 sudah tercapai nilai 3,00, dengan persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi PK APIP pada tiga tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3

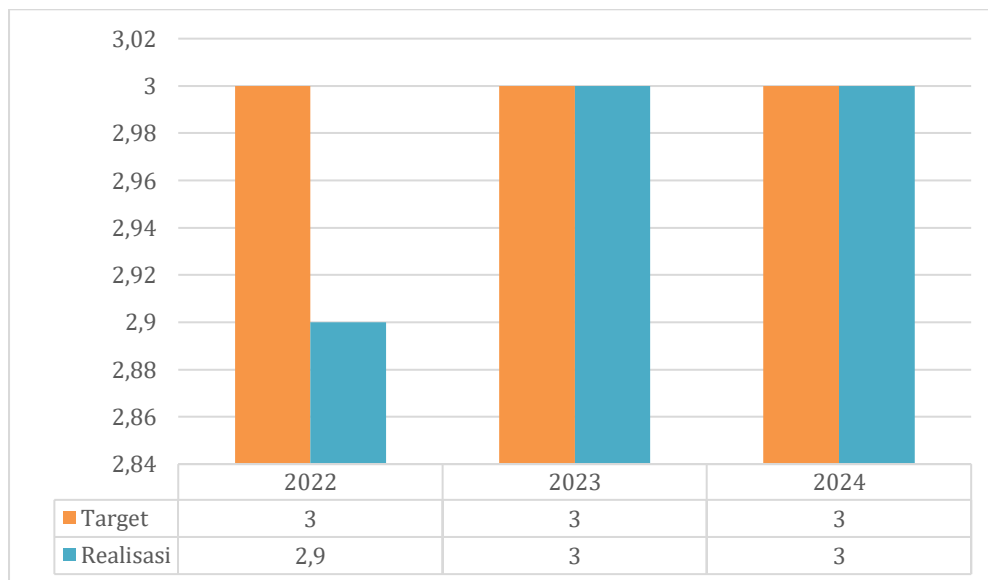
Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Target	<i>Integrated</i> Level 3 (3,00)	<i>Integrated</i> Level 3 (3,00)	<i>Integrated</i> Level 3 (3,00)
Realisasi	<i>Infrastructure</i> Level 2 (2,90)	<i>Integrated</i> Level 3 (3,00)	<i>Integrated</i> Level 3 (3,00)
Capaian	97%	100%	100%

Tren realisasi indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP pada tahun 2022-2024 digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3. 1

Tren Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2022-2024



Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
2. Pengelolaan SDM (*People Management*)
3. Praktik Profesional (*Professional Practices*)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Berdasarkan hasil *quality assurance* (QA) BPKP Pusat yang telah ditetapkan dengan Surat BPKP Nomor: PE.09.03/LHP-635/PW13/6/2024 tanggal 4 September 2024, nilai

Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah level 3 (*integrated*) dengan skor 3,00 ini mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan *compliance auditing*, *performance auditing* dan *practice advisory* antara lain:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (*Area of Improvement*), antara lain sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya memiliki SDM dengan kompetensi guna mengelola risiko atau manajemen risiko agar dapat melakukan identifikasi/penilaian risiko sesuai dengan proses yang benar;
2. Belum mengimplementasikan Manajemen Risiko dalam penyusunan PPBR dengan baik yang disertai dengan langkah-langkah konkrit dalam perbaikan register risiko dan PPBR.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan dengan pengawasan berbasis risiko;
2. Memutakhirkan risk register yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP, antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga/badan terkait untuk memutakhirkan register risiko dan PPBR.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP dengan Kabupaten/Kota Lain Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kapabilitas APIP	
		Skor	Level
1	Kabupaten Sidoarjo	3,00	3
2	Kota Pasuruan	3,00	3
3	Kabupaten Pasuruan	3,00	3
4	Kabupaten Malang	3,00	3
5	Kota Batu	3,00	3

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP dengan Target Nasional Tahun 2024

No	Realiasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024		Target Nasional Tahun 2024		Capaian (%)
	Skor	Level	Skor	Level	
1	3,00	3	3,00	3	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo sudah sejajar dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun realisasi indikator ini juga sebanding dengan target nasional Kapabilitas APIP pada Tahun 2024 yang ditetapkan oleh BPKP melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP menetapkan target pencapaian Level 3 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah
a) Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP
Tabel 3. 6
Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 terhadap target jangka menengah

Target	Realiasasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)	Ket.
84,60 (A)	88,22 (A)	104,28%	84,80 (A)	104%	

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 104,28% dengan realisasi 88,22 (A) dari target 84,60 (A). Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026, realisasi tahun 2024 sudah mencapai target tersebut dengan persentase capaian sebesar 104%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi

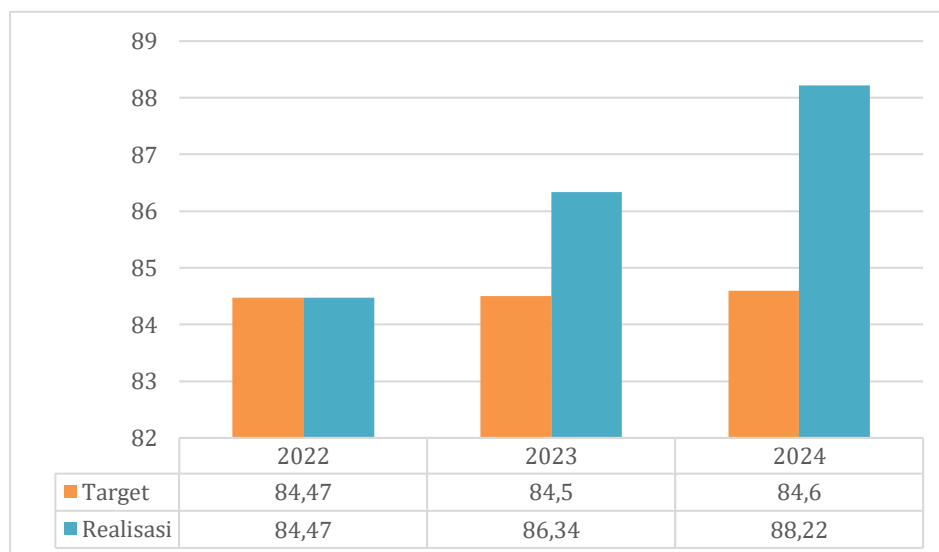
tahun 2024 telah mengalami peningkatan sebesar 2,17% dari realisasi 86,34 (A) pada tahun 2023. Adapun realisasi Nilai SAKIP pada tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 7
Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Target	84,47 (A)	84,50 (A)	84,60 (A)
Realisasi	84,47 (A)	86,34 (A)	88,22 (A)
Capaian	100%	102,18%	104,28%

Tren realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2022-2024 digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3. 2
Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022-2024



SAKIP merupakan alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25%

Pada komponen LKE SAKIP yang meliputi, Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024, nilai SAKIP Inspektorat Daerah adalah 88,22 dengan predikat A (memuaskan) berdasarkan hasil evaluasi oleh evaluator SAKIP kabupaten yang telah ditetapkan dengan Surat Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1/3854/438.4/2024 tanggal 13 Desember 2024. Nilai SAKIP

Inspektorat Daerah menduduki peringkat ke-2 dari 49 OPD. Ini berarti Inspektorat Daerah sudah dapat mengimplementasikan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dikarenakan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dengan hasil berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (*Area of Improvement*), antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan Perjanjian Kinerja;
2. Melakukan pembaruan SK *Reward* dan *Punishment*;
3. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dengan melakukan perbandingan capaian ditingkat nasional/internasional yang selaras;
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal perbaikan dan peningkatan capaian akuntabilitas kinerja melalui pelatihan/pendidikan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan risiko.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai SAKIP lebih optimal, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
2. Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan, workshop, bimtek, dan PPM.
3. Membudayakan evaluasi internal kinerja tiap bulan secara berjenjang.
4. Melakukan inovasi pelayanan pengawasan.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP, antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi;
2. Adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan nilai SAKIP.

Adapun perbandingan nilai SAKIP Inspektorat Daerah dengan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,63% lebih tinggi. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 88,22, sedangkan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo sebesar 75,64.

b) Indikator Kinerja 2 : **Nilai IPP**

Tabel 3. 8

Capaian Nilai IPP Tahun 2024 terhadap target jangka menengah

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)	Ket.
4,07 (A-)	4,083 (A-)	100,31%	4,10 (A-)	99,58%	

Capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 sebesar 100,31% dengan realisasi 4,083 (A-) dari target 4,07 (A-). Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026, maka target tersebut telah tercapai pada tahun 2024 sudah sebesar 99,58% dari target 4,10 (A-) yang telah ditargetkan. Adapun perbandingan capaian Nilai IPP pada tahun 2022-2024 pada tabel berikut :

Tabel 3. 9

Realisasi Nilai IPP Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Target	4,04 (A-)	4,05 (A-)	4,07 (A-)
Realisasi	4,04 (A-)	4,07 (A-)	4,083 (A-)
Capaian	100%	100,5%	100,31%

Tren realisasi indikator kinerja Nilai IPP pada tahun 2022-2024 digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3. 3

Tren Realisasi Nilai IPP Tahun 2022-2024



Hasil penilaian IPP yang ditetapkan melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor: 000.8.3.4/1001/438.1.3.1/2025 tanggal 24 Januari 2025 menunjukkan bahwa nilai IPP Inspektorat Daerah pada tahun 2024 adalah 4,083 dengan capaian 100,31% dari nilai 4,07 yang ditargetkan. Nilai IPP tahun 2024 mengalami peningkatan dikarenakan Inspektorat Daerah selalu konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (*Area of Improvement*), antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan pelayanan perlu disempurnakan;
2. Peningkatkan profesionalisme SDM melalui diklat, bimtek, seminar, dan sejenisnya;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana, seperti perbaikan lahan parkir, penyediaan fasilitas ruang tunggu dan *front office*;
4. Melakukan inovasi dengan cara menyediakan sistem informasi, konsultasi dan pengaduan secara elektronik/daring.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai IPP lebih optimal, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta evaluasi secara berkala atas manajemen kualitas jasa pelayanan.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IPP, antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi;
2. Adanya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.

Adapun perbandingan nilai IPP Inspektorat Daerah dengan nilai IPP Kabupaten Sidoarjo sebesar 12,20% lebih rendah. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 4,083, sedangkan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,65.

c) Indikator Kinerja 3 : **Nilai SKM**

Tabel 3. 10

Capaian Nilai SKM Tahun 2024 terhadap target jangka menengah

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)	Ket.
Sangat Baik (91,00)	Sangat Baik (97,04)	106,64%	Sangat Baik (93,00)	104,34%	

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 sebesar 106,64% dengan realisasi Sangat Baik (97,04) dari target Sangat Baik (91,00). Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026, target tersebut telah tercapai pada tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 104,34% dari target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian Nilai SKM pada tahun 2022-2024 pada tabel berikut :

Tabel 3. 11

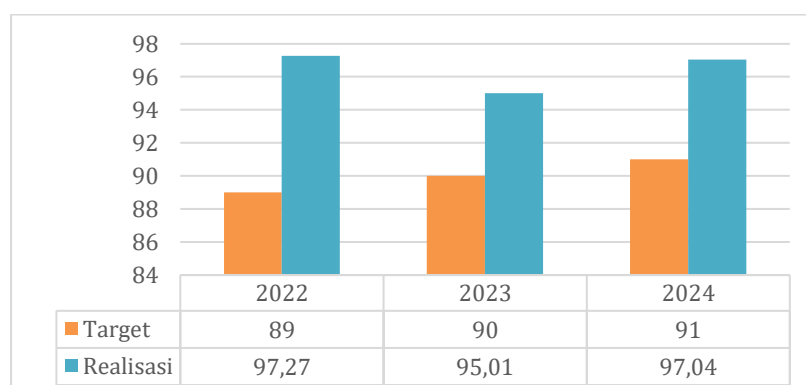
Realisasi Nilai SKM Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Target	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (90,00)	Sangat Baik (91,00)
Realisasi	Sangat Baik (97,27)	Sangat Baik (95,01)	Sangat Baik (97,04)
Capaian	109,29%	105,1%	106,64%

Tren realisasi indikator kinerja Nilai SKM pada tahun 2022-2024 digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3. 4

Tren Realisasi Nilai SKM Tahun 2022-2024



Hasil SKM melalui media elektronik yang telah ditetapkan dengan Publikasi SKM oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor: 000/391/438.4/2025 tanggal 7 Februari 2024 menunjukkan bahwa nilai SKM Inspektorat Daerah adalah 97,04 dengan capaian 106,64% dari nilai 91,00 yang ditargetkan pada tahun 2024. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 2,03 poin bila dibandingkan dengan Nilai SKM pada tahun 2024. Selain itu, jumlah responden pada tahun 2024 meningkat sebesar 17,01% menjadi 1011 responden dari 864 responden pada tahun 2023. Capaian Nilai SKM 106,64% menunjukkan bahwa kolaborasi komitmen pimpinan dan seluruh personil APIP dalam mewujudkan pelayanan pengawasan yang SMART telah terimplikasikan dengan baik.

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (*Area of Improvement*), antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya konsistensi pelayanan pengawasan sesuai dengan SP dan SOP;
2. Kompetensi SDM perlu ditingkatkan melalui diklat, seminar, dan sebagainya.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai SKM lebih optimal, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
2. Konsistensi pelayanan pengawasan sesuai dengan SP dan SOP.
3. Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan, workshop, bimtek, dan PPM.
4. Memberikan konsultasi secara tatap muka dan daring.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SKM, antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi;
3. Adanya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.

Pada indikator kinerja nilai SKM dalam sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah, tidak tersedia data target nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024.

B. Realisasi Kinerja Anggaran

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran;

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja

Tabel 3. 12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	kinerja			anggaran			tingkat efisiensi (a*b)- c/(a*b)*100%
		target	realisasi	% kinerja (a)	target (b)	realisasi (b)	% anggaran	
Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	100,00%	1.054.922.504	808.223.590	76,61%	23,39%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,60	88,22	102,77%	19.422.686.451	18.813.164.677	96,86%	5,75%
	Nilai IPP	4,07	4,08					
	Nilai SKM	91,00	97,04					

Pagu anggaran pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah** yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran tersebut dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{\prod_{j=1}^n \text{Realisasi Indikator}_i}{\prod_{j=1}^n \text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah :

- a. Indikator Tingkat Kapabilitas APIP dengan tingkat efisiensi sebesar 23,39% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan adalah Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 5,75% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 1. Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
 2. Sebagian permasalahan terkait laptop dan komputer dapat diselesaikan oleh tenaga IT dari ASN Internal.
- 2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Terdapat 2 (dua) program untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis Inspektorat Daerah pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 13

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.054.922.504	808.223.590	76,61%

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	104,28%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	19.422.686.451	18.813.164.677	96,86%
	Nilai IPP	100,31%				
	Nilai SKM	106,64%				

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja 2 (dua) program pendukung sasaran strategis mendapat rata-rata sebesar 102,81% dengan kategori **sangat berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan dalam kegiatan Inspektorat Daerah sangat mendukung ketercapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan pada awal tahun 2024.

3) Realisasi Anggaran

Tabel 3. 14
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 19.422.686.451	Rp. 18.813.164.677	96,86%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.054.922.504	Rp. 808.223.590	76,61%
Jumlah	Rp. 17.517.072.107	Rp. 20.477.608.955	95,82%

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 95,82% diperoleh dari 2 (dua) program. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp 18.813.164.677,00 dari target Rp 19.422.686.451,00 dengan persentase serapan anggaran 96,86%. Dari 20 (dua puluh) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan persentase serapan paling tinggi yaitu subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat serapan sebesar 99,99%. Sedangkan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan tingkat serapan anggaran pada tahun 2024 berada pada angka 76,61% yaitu dari target sebesar

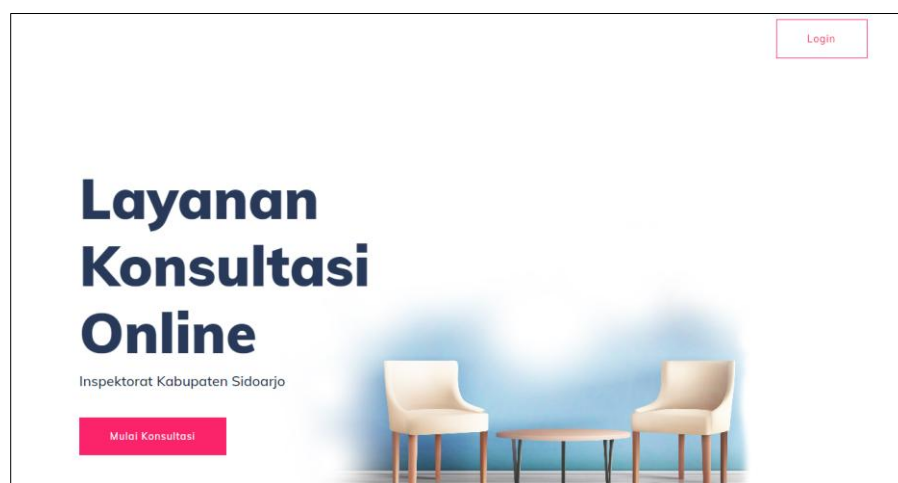
Rp 1.054.922.504,00 terealisasi sebesar Rp 808.223.590,00. Dari 7 (tujuh) sub kegiatan pada program penyelenggaraan pengawasan terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan tingkat serapan anggaran paling tinggi yaitu pada subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar 91,98%.

C. Inovasi

Inovasi pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1) *Electronic Consulting (E-Consulting)*

Gambar 3. 5
Aplikasi E-Consulting



Sumber: <https://e-consulting.sidoarjokab.go.id/>

Electronic Consulting (e-Consulting) merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan konsultasi dan diskusi terkait keberlangsungan kegiatan pemerintahan di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa harus mendatangi kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. *E-Consulting* dirancang dan dipublikasikan penggunaannya pada tahun 2020. Perbaikan dilakukan setiap tahun guna meningkatkan pelayanan pengawasan. Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan berupa penambahan fitur notifikasi telegram. Penambahan fitur ini bertujuan untuk mempercepat waktu respon dalam menjawab konsultasi dari OPD. Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pemeliharaan secara rutin pada sistem aplikasi.

2) Portal Penilaian Risiko (POLAR)

Gambar 3. 6
Aplikasi POLAR



Sumber: <https://polar.sidoarjokab.go.id/>

Portal Penilaian Risiko (POLAR) merupakan aplikasi berbasis *website* yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko kegiatan perangkat daerah yang akan diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu portal ini juga menjadi fungsi *fraud early detection system* bagi kegiatan – kegiatan yang berisiko tinggi, sehingga pada muaranya akan mampu mencegah pelanggaran – pelanggaran. POLAR digagas pada Bulan November 2022 dan dipublikasikan penggunaannya pada Bulan Februari 2023. Pada tahun 2024, terdapat perubahan dan perbaikan untuk tampilan maupun mekanisme input user OPD agar lebih mudah dan efektif kedepannya. Berikut perubahan dalam aplikasi POLAR v1.1 ke aplikasi POLAR v2.0, antara lain.

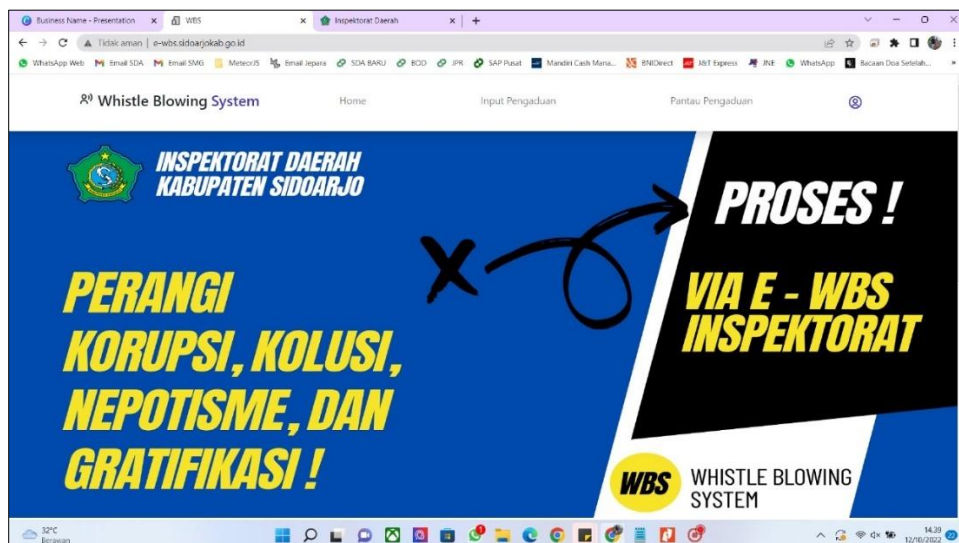
POLAR-v1.1	POLAR-v2.0
<ul style="list-style-type: none"> • Input tahun penilaian risiko digabung dengan pengisian Tujuan Kegiatan OPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Input tahun penilaian risiko dipisah agar OPD lebih mudah dan lebih terfokus pada tahun penilaian yang dipilih
<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan Sasaran dimasukkan secara manual oleh OPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Tujuan, Sasaran, dan Program sudah terkoneksi melalui tombol generate
<ul style="list-style-type: none"> • Tampilan RENSTRA sebelumnya berupa tabel dan memanjang kebawah sehingga menyusahkan user OPD untuk melihat data RENSTRA 	<ul style="list-style-type: none"> • Tampilan RENSTRA menjadi “<i>cascading</i>” seperti yang ada pada SIPD sehingga OPD familiar dengan tampilan dan memudahkan dalam melihat data.

<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada input indikator kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi untuk pengisian indikator kinerja
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pengisian Pernyataan Risiko sampai dengan RTP user mengisi secara terpisah 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pengisian Pernyataan Risiko sampai dengan RTP user mengisi secara tersambung sehingga data tidak bisa tersimpan kalau risiko belum diinputkan semua

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pemanfaatan Aplikasi Portal Penilaian Risiko (POLAR) dalam Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bakamla-RI nomor : KS.01/10/VIII/2024 dan 100.3.7.1/17/438.1.1.4/2024 tanggal 30 Agustus 2024, aplikasi ini akan dilakukan replikasi oleh Badan Keamanan Laut RI yang masa pemanfaatannya akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Selain itu, versi aplikasi terbaru ini masih akan dilakukan pengembangan ke depannya agar semakin memudahkan pengguna dalam melakukan penilaian risiko dan mendeteksi sejak dini terkait kemungkinan terjadinya *fraud* dan risiko lainnya.

3) *Electronic Whistle Blowing System (E-WBS)*

Gambar 3. 7
Aplikasi E-WBS



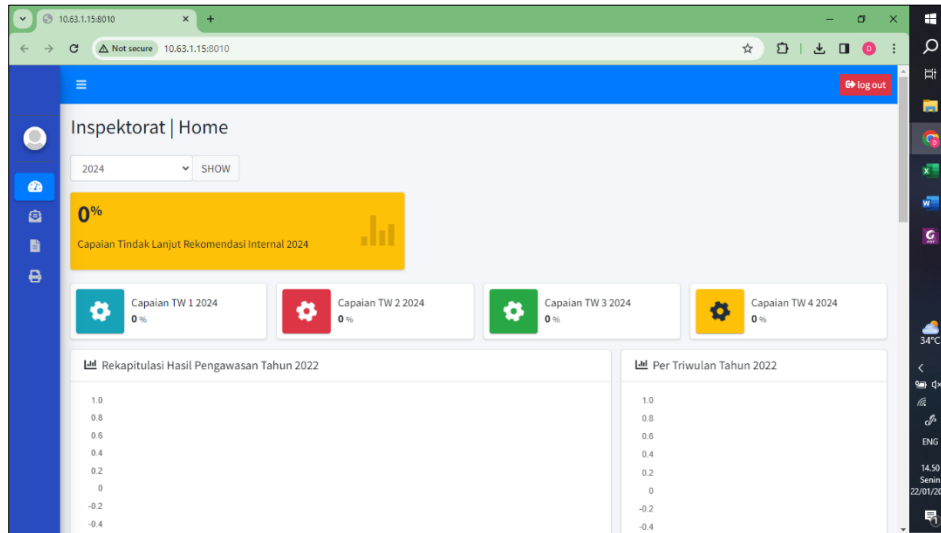
Sumber: <https://e-wbs.sidoarjokab.go.id/>

Electronic Whistle Blowing System (e-WBS) merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa harus mendatangi kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu pelapor juga dapat memantau secara langsung progres dari penanganan pengaduan yang telah dikirimkan

ke Inspektorat Daerah secara *real time*. E-WBS digagas pada tahun 2021 dan dipublikasikan pada awal tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pemeliharaan secara rutin pada sistem aplikasi.

4) Sistem Informasi Administrasi Pengawasan (SIAP)

Gambar 3. 8
Aplikasi SIAP



Sumber: <https://10.63.1.15/>

Sistem Informasi Administrasi Pengawasan adalah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk mencatat SPT Pengawasan sampai dengan hasil dari Pengawasan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini juga bertujuan untuk memonitoring pengawasan yang telah dilakukan serta kualitasi pengawasan yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. SIAP digagas pada tahun 2021 dan mulai digunakan pada tahun 2022. Adapun fitur penambahan inovasi yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu:

- a. Unggah dokumen tambahan dalam SPT untuk kebutuhan monitoring penugasan pengawasan;
- b. Memperbaiki tampilan halaman SPT dan temuan;
- c. Pembuatan SPT secara otomatis sehingga file tinggal upload ke dalam E-Buddy; dan
- d. Pengembangan *tracking progress* LHP di dalam aplikasi.

Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pemeliharaan secara rutin pada sistem aplikasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2024 rata-rata 102,81% dengan kategori sangat berhasil. Sasaran dengan kategori sangat berhasil, yakni Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah dengan rata-rata 103,74%. Sementara itu, sasaran dengan kategori berhasil adalah Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko dengan persentase sejumlah 100%. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal dan berkualitas.

B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut

Dalam pencapaian realisasi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat yang dapat dipergunakan sebagai suatu cara untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hambatan-hambatan tersebut beragam, mulai dari perlunya peningkatan SDM untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan pelayanan pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pelayanan secara maksimal, hingga penyediaan sistem informasi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan pengawasan.

Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
2. Mengoptimalkan kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya pada perangkat daerah dan desa.
3. Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko.
4. Peningkatan kompetensi seluruh pegawai agar lebih *smart* dan prima dalam menyelesaikan tugasnya.
5. Melakukan evaluasi secara berkala agar hambatan-hambatan yang timbul segera dapat diselesaikan.
6. Mengimplementasikan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pengawasan), *Electronic Whistle Blowing System (E-WBS)*, Portal Penilaian Risiko (POLAR), dan *Electronic Consulting (e-Consulting)* dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas pengawasan.

Adapun faktor penunjang dalam pelaksanaan upaya pemecahan masalah tersebut adalah tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pegawai yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 197009261990031005



LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah



PERJANJIAN KINERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos**
Jabatan : **INSPEKTUR**
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : **H. AHMAD MUHDOR, S.IP**
Jabatan : **BUPATI SIDOARJO**
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

Sidoarjo, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,
INSPEKTUR



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos
197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda
197009261990031005


PERJANJIAN KINERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Integrated
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,60 (A)
		Nilai IPP	4,07 (A-)
		Nilai SKM	Sangat Baik (91)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Tambahan	Target
-----	---------	----------------------------	--------

JUMLAH ANGGARAN 2024

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 16.414.239.603	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 1.102.832.504	
JUMLAH		Rp. 17.517.072.107	

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO



H. AHMAD MUHDOR, S.IP

Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

Sidoarjo, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,
INSPEKTUR



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda
197009261990031005

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos
197009261990031005

2. Perjanjian Kinerja Eselon III sampai dengan pelaksana dan Perubahan

<https://bit.ly/PKInspektorat2024>

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024

INSPEKTORAT DAERAH

- Tugas Pokok Jabatan** : Memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah
- Fungsi Jabatan** :
1. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 4. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 5. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan;
 6. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 7. Melaksanakan pengawasan atas program reformasi birokrasi;
 8. Melaksanakan administrasi inspektorat daerah;
 9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya Pengawasan Yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Untuk mengukur tingkat kapabilitas APIP diperoleh dari hasil <i>quality assurance</i> (QA) BPKP	Laporan BPKP
Meningkatnya kualitas penyelenggar	Nilai SAKIP	Untuk mengukur Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh evaluator	LHE



an pemerintahan	Nilai IPP	Untuk mengukur Nilai IPP diperoleh dari hasil penilaian IPP oleh tim penilai kabupaten	Laporan IPP
	Nilai SKM	Untuk mengukur Nilai SKM diperoleh dari hasil SKM melalui media elektronik	Laporan SKM

Sidoarjo, 17 Januari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE

**Pembina Utama Muda
NIP. 197009261990031005**



D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2024





E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2024





F. Matriks Renstra/ Renja

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan				
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif				Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	14.798.079.918,40	Terdefinisi	13.768.510.253,25	Terdefinisi	18.254.938.301,71	Terdefinisi	19.701.842.234,97	Terdefinisi	22.366.676.686,91	Terdefinisi	22.366.676.686,91				
				Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,71	3,76	3.699.519.979,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	n/a	n/a		82	4.589.503.417,75	82,5	6.084.979.433,90	83	6.567.280.744,99	83,5	7.455.558.895,64	83,5	7.455.558.895,64				
Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko				Tingkat Kapabilitas APiP	Infrastructure	Infrastructure	12.948.319.928,60	Integrated	12.850.609.569,70	Integrated	17.037.942.414,93	Integrated	18.388.386.085,98	Integrated	20.875.564.907,79	Integrated	20.875.564.907,79				
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A (81,95)	A (84,47)	5.549.279.969,40	A (84,50)	5.507.404.101,30	A (84,60)	7.301.975.320,68	A (88,03)	7.880.736.893,99	A (88,25)	8.946.670.674,77	A (88,25)	8.946.670.674,77			
				Nilai RB	35,90	36,12		36,13		-		-		-		-		-			
				Nilai IPP	n/a	A- (4,04)		A- (4,05)		A- (4,07)		A- (4,09)		A- (4,10)		A- (4,10)		-			
				Nilai SKM	Sangat Baik (88,504)	Sangat Baik (89,00)		Sangat Baik (90,00)		Sangat Baik (91,00)		Sangat Baik (96,44)		Sangat Baik (97,00)		Sangat Baik (97,00)		-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	70,37%	76,00%	17.033.314.398,00	78,00%	16.883.299.278,00	80,00%	21.013.737.735,61	82,00%	22.629.818.119,96	85,00%	26.000.902.857,55	85,00%	26.000.902.857,55	Sekretariat			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Inspektorat	A (81,95)	A (84,47)	1.684.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat			
				b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	n/a	80,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	n/a	n/a		9 Dok	3.081.233,00	9 Dok	25.585.764,60	9 Dok	28.144.341,06	9 Dok	30.958.775,17	9 Dok	30.958.775,17	Sekretariat			
				b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	n/a	n/a		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok					

<https://bit.ly/MatriksRenstraInspektorat>



G. LHE SAKIP Tahun 2023

alih media sesuai asli.inspektorat.ir2.438.4.15311.2023.2024.sakip1



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 24 Desember 2023

Nomor : 700/15311/438.4/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
AKIP Inspektorat Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Kepada
Yth. Inspektur
Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah menugaskan tim dengan surat tugas nomor : 700/ 2257/438.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan SPT Nomor : 700/2933/438.4/2023 tanggal 23 Oktober 2023 untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu system

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Jawa Timur
Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax. 8946924



Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

A. SIMPULAN HASIL EVALUASI

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2021–2026 telah direviu secara berkala, didukung dengan BA Reviu Renstra, menyajikan Bab 1 s.d 8 lengkap disertai daftar tabel dan daftar gambar (tanggal 27 Juni 2023). Pada Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memuat 1 Tujuan dengan 2 indicator kinerja dan 2 sasaran dengan 5 indicator.
- b. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (Eselon II) telah memuat 1 indicator tujuan dengan 2 indicator dan 2 Sasaran dengan 5 indikator, namun masih terdapat perbedaan narasi pada indicator tujuan **indeks survei eksternal persepsi korupsi target 3,81** sedangkan pada Perubahan Renstra 2021-2026 indicator tersebut **indeks persepsi anti korupsi target 82**, serta perbedaan target indicator sasaran Tingkat Kapabilitas APiP dengan target integrated level 3 (3,450) pada PK, sedangkan pada Perubahan Renstra 2021-2026 target integrated. Perjanjian Kinerja eselon II disusun manual, sedangkan SKP individu dilakukan melalui aplikasi <https://sso.sidoarjokab.go.id>.
- c. Rencana aksi atas kinerja masing-masing individu telah dibuat periodik perbulan yang mencantumkan sasaran kinerja, rencana hasil kinerja, aspek, indicator kinerja individu, target, periode penilaian, bulan pemantauan, sumber data dan aksi.
- d. Dalam rangka implementasi manajemen risiko telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko atas kegiatan/sub kegiatan yang

4

alih media sesuai asli.inspektorat.ir2.438.4.15311.2023.2024.sakip1

ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023. Risiko telah dibuat analisa risikonya dan rencana tindak pengendalian atas masing-masing risiko dilengkapi dengan target waktu dan penanggung jawab risiko yang telah ditetapkan sebagai bentuk mitigasi risiko OPD, melalui aplikasi <https://polar.sidoarjokab.go.id>

- e. Pemenuhan dokumen identifikasi kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2024 telah disajikan, dalam rangka untuk bahan penyusunan Renja 2024.
- f. Monitoring atas target kinerja jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan telah disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2022, didukung SOP monitoring Renstra secara periodic.

2. Pengukuran Kinerja

- a. IKU eselon II telah ditetapkan secara formal, namun perlu diselaraskan dengan Perubahan Renstra 2021-2026, pada narasi indicator Indeks survei eksternal persepsi korupsi dan sumber data serta formulasi perhitungan/penjelasan pada indicator kapabilitas APiP.
- b. Pengumpulan data kinerja telah dilakukan dengan mekanisme/SOP tentang pengumpulan data kinerja dan jika terdapat kesalahan data kinerja.
- c. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala dalam rangka untuk melakukan Evaluasi Internal berkala triwulan I dan II telah disajikan mulai dari pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) sampai dengan level individu.
- d. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi informasi (aplikasi) melalui <https://sso.sidoarjokab.go.id>
- e. Inspektorat Daerah telah menetapkan kebijakan tentang Pemberian Reward dan Punishment di lingkungan Inspektorat Daerah pada Tanggal 2 Januari 2020. Telah diimplementasikan dilengkapi komponen penilaian, penetapan penerima reward Tahun 2022, sertifikat dan dokumentasi.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen laporan Kinerja Inspektorat Daerah telah menyajikan informasi kinerja mengenai capaian 2 indicator kinerja tujuan dengan kesimpulan 2 indicator tujuan tercapai 100% dan kinerja sasaran dengan kesimpulan dari 6 indikator tercapai seluruhnya 100%
- b. Dokumen laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang capaian kinerja dan analisa penjelasannya.

5



- c. Dokumen laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja dengan target jangka menengah juga telah disajikan sehingga dapat diketahui informasi apakah kinerja lebih baik. Namun **belum disajikan dengan pembanding lainnya** yaitu capaian ditingkat nasional/internasional sebagai parameter keberhasilan.
 - d. Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja OPD juga telah disajikan termasuk realisasi anggarannya per program dan kegiatan.
 - e. Informasi atas tingkat efisiensi yang dicapai oleh OPD telah menyajikan data secara kuantitatif dan analisa penyebab keberhasilan atas pencapaian efisiensinya.
 - f. Laporan kinerja Tahun 2022 sudah dilakukan reviu internal.
 - g. Dokumen realisasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian SPIP dan laporan pelaksanaan RTP Tahun 2022 telah disusun dan dilaporkan kepada Bupati sebagai suatu kewajiban Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka implementasi manajemen risiko, namun ketika terdapat RTP yang belum dapat teralisasi sesuai target, belum didukung keterangan/penjelasannya.
4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
- a. Evaluasi Internal berkala triwulan I dan II Tahun 2023 telah disajikan mulai dari pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) sampai dengan level individu. Dokumen Evaluasi Internal juga telah dilengkapi dengan data berupa sasaran strategis, indikator Kinerja, target tribulan, realisasi, capaian, target tahunan dan progress capaian tahunan, menyajikan simpulan baik keberhasilan maupun kegagalan atas capaian kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi atasan, tindaklanjut atau upaya perbaikan, sebagai bahan untuk perbaikan kinerja organisasi ke depan.
 - b. Pelaksanaan evaluasi internal atas program dan kegiatan disajikan **secara periodik** per triwulan dengan menggunakan teknologi informasi/ aplikasi (e-Monev dan e-Kenda).
 - c. Belum seluruh rekomendasi laporan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya ditindaklanjuti, salah satunya dalam dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala telah dilaksanakan, namun pemanfaatan atas hasil evaluasi belum seluruhnya optimal.



B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Kinerja dan Pengendalian Risiko di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, direkomendasikan perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Melaksanakan **penyelarasan Perjanjian Kinerja eselon II** dengan Perubahan Renstra 2021-2026 dalam rangka penyelarasan indicator **indeks persepsi anti korupsi** dan targetnya, serta target indicator kapabilitas APIP.

2. Pengukuran Kinerja

Melaksanakan penyelarasan IKU dengan Perubahan Renstra 2021-2026, pada indicator, sumber data serta formulasi perhitungan/penjelasan pada **indicator kapabilitas APIP**.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Untuk tahun berikutnya dalam penyusunan Laporan Kinerja agar menyajikan informasi pembandingan capaian kinerja / *outcome* dengan capaian ditingkat nasional/internasional dan instansi yang sejenis sepanjang data kinerjanya selaras.
- b. Untuk selanjutnya menyempurnakan penyusunan laporan pelaksanaan RTP, jika terdapat RTP yang belum dapat teralisasi sesuai target, didukung keterangan/penjelasannya.
- c. Mempertahankan kinerja yang berhasil dan meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran serta menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Selanjutnya melaksanakan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja, sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.



alih media sesuai asli.inspektorat.ir2.438.4.15311.2023.2024.sakip1

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur
Up. Inspektur Propinsi Jawa Timur
di Sidoarjo

H. Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2024

RENCANA AKSI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2024 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO									
No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan (Triwulan)				Koordinator/ Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	
1	PERENCANAAN KINERJA								
	Melaksanakan penyesuaian Perjanjian Kinerja eselon II dengan Perubahan Renstra 2021-2026 dalam rangka penyesuaian indikator indeks persepsi anti korupsi dan targetnya, serta target indikator kapabilitas APIP.	Membuat Perjanjian Kinerja eselon II sesuai dengan perubahan renstra 2021-2026	a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data sebagai bahan penyusunan PK eselon II b. Mengkoordinasikan dengan atasan tentang data perubahan renstra c. Menyusun berita acara perubahan renstra d. Menyusun dokumen perjanjian kinerja eselon II	Dokumen perjanjian kinerja 2024 yang selaras dengan Perubahan Renstra 2021-2026	✓				Perencanaan
2	PENGUKURAN KINERJA								
	Melaksanakan penyesuaian IKU dengan Perubahan Renstra 2021-2026, pada indikator, sumber data serta formulasi perhitungan/penjelasan pada indikator kapabilitas APIP.	Menyusun IKU dengan menyesuaikan pada Perubahan Renstra 2021-2026	Melakukan perbaikan terhadap sumber data dan penjelasan/formulasi perhitungan pada setiap Indikator Kinerja Utama yang disesuaikan dengan Perubahan Renstra 2021-2026	IKU 2024 yang sesuai dengan Perubahan Renstra 2021-2026	✓				Perencanaan
3	PELAPORAN KINERJA								
	3.1. Untuk selanjutnya menyempurnakan penyusunan laporan pelaksanaan RTP, jika terdapat RTP yang belum dapat teralisasi sesuai target, didukung keterangan/penjelasannya.	Menyusun laporan pelaksanaan RTP dengan bukti dukung/penjelasan yang handal	Melakukan koordinasi dengan bidang pengampu subkegiatan terkait dalam melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan RTP	Laporan pelaksanaan RTP 2023	✓				Sekretaris
	3.2. Untuk tahun berikutnya dalam penyusunan Laporan Kinerja agar menyajikan informasi pembandingan capaian kinerja / outcome dengan capaian ditingkat nasional / internasional dan instansi yang sejenis sepanjang data kerjanya selaras.	Menyusun LKjIP dengan emaskan data/informasi capaian ditingkat nasional/internasional serta capaian kinerja instansi sejenis	a. Mengumpulkan data capaian kinerja tingkat nasional/internasional serta capaian kinerja instansi sejenis yang sesuai dengan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo b. Menyusun LKjIP 2023 dengan memperhatikan data/informasi capaian kinerja di tingkat nasional serta instansi sejenis	LKjIP tahun 2023 dengan menyajikan data capaian nasional/internasional serta APIP Kab./Kota lain yang indikatornya selaras	✓				Sekretaris



No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan (Triwulan)				Koordinator/ Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	
	3.3. Mempertahankan kinerja yang berhasil dan meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran serta menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal	a. Melakukan evaluasi internal kinerja secara disiplin dan berkala b. Mendisiplinkan evaluasi internal secara berjenjang c. Menyusun dokumen evaluasi internal dengan menyajikan proses capaian dalam bentuk langkah-langkah konkret/nata sebagai tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi sebelumnya	Laporan kinerja dengan menyajikan data efisiensi anggaran dan inovasi pelayanan publik tahun-tahun sebelumnya	✓	✓	✓	✓	Pejabat eselon
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL								
	Selanjutnya melaksanakan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja, sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP	a. Mengidentifikasi tiap rekomendasi hasil evaluasi AKIP b. Koordinasi dengan pejabat terkait untuk menentukan rencana tindak lanjut c. Menyusun dokumen rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP d. Memantau pelaksanaan rencana aksi peningkatan implementasi SAKIP	Dokumen rencana aksi peningkatan implementasi SAKIP tahun 2024	✓	✓	✓	✓	Pejabat eselon

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

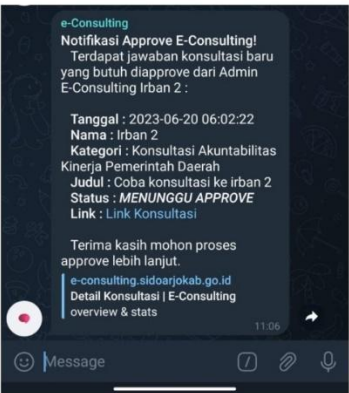



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005

I. Inovasi Tahun 2024

E-Consulting

	<p>06</p> <p>TAMPILAN APPROVE INSPEKTUR</p>
	<p>05</p> <p>NOTIFIKASI KONSULTASI BARU DARI OPD</p>
	<p>08</p> <p>TAMPILAN APABILA ADA BALASAN DARI OPD</p>
	<p>07</p> <p>TAMPILAN APABILA ADA KOREKSI DARI INSPEKTUR</p>

POLAR



Beranda

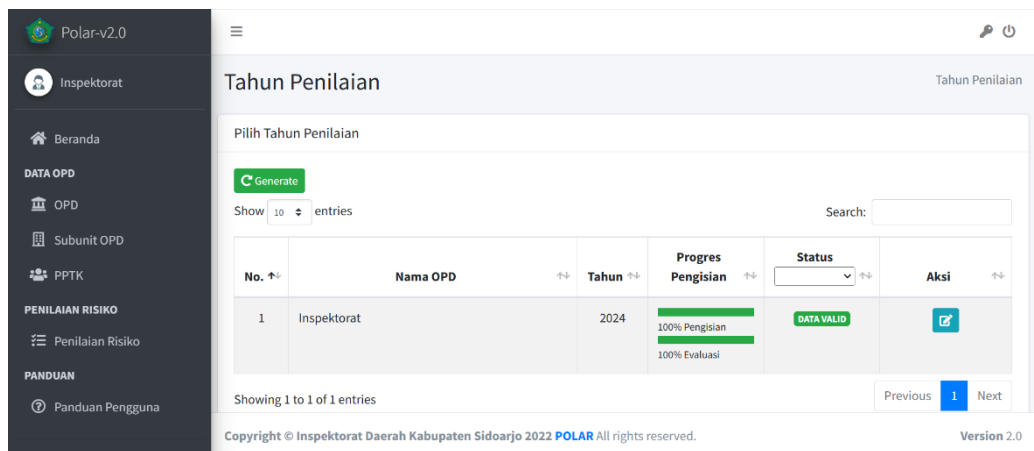
Selamat Datang di Polar-v2.0

Profil OPD

Kode : 6.01.0.00.0.00.01 / 438.4
 Nama OPD : Inspektorat
 NIP Kepala OPD : 197009261990031005
 Nama Kepala OPD : ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
 Jabatan Kepala OPD : INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO | **ALUR PENGISIAN POLAR-v2.0**

Copyright © Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2022 POLAR All rights reserved. Version 2.0



Tahun Penilaian

Pilih Tahun Penilaian

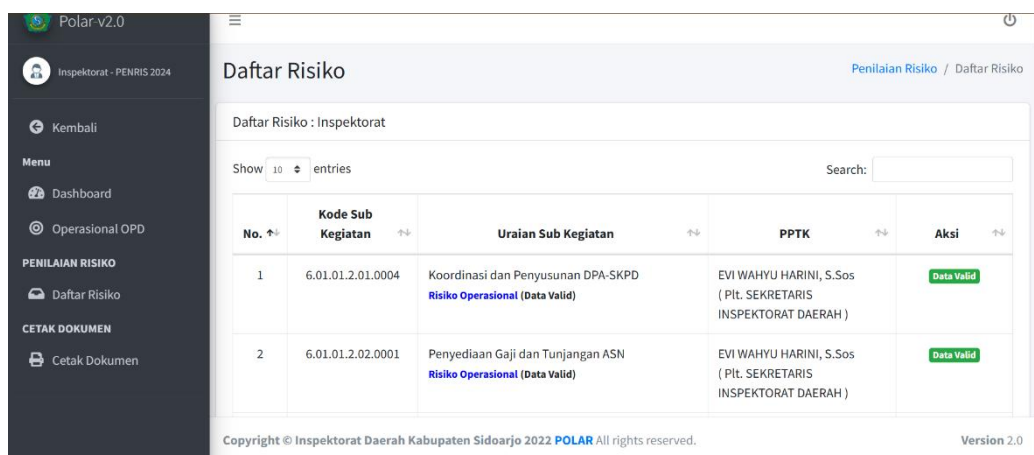
Generate

Show 10 entries Search:

No.	Nama OPD	Tahun	Progres Pengisian	Status	Aksi
1	Inspektorat	2024	100% Pengisian 100% Evaluasi	DATA VALID	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Copyright © Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2022 POLAR All rights reserved. Version 2.0



Daftar Risiko

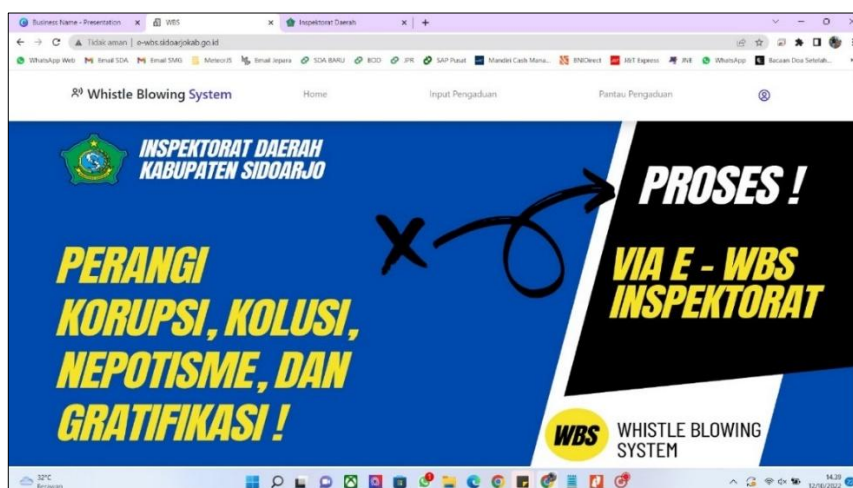
Daftar Risiko : Inspektorat

Show 10 entries Search:

No.	Kode Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	PPTK	Aksi
1	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Risiko Operasional (Data Valid)	EVI WAHYU HARINI, S.Sos (Pit. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH)	Data Valid
2	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Risiko Operasional (Data Valid)	EVI WAHYU HARINI, S.Sos (Pit. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH)	Data Valid

Copyright © Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2022 POLAR All rights reserved. Version 2.0

E-WBS



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERANGI
KORUPSI, KOLUSI,
NEPOTISME, DAN
GRATIFIKASI !**

**PROSES !
VIA E - WBS
INSPEKTORAT**

**WBS WHISTLE BLOWING
SYSTEM**

SIAP

log out

SPT

Home / SPT

DATA SPT

-Jenis Pengawasan- -Pilih Tahun- -Pilih Bulan-

-Jenis Pengawasan- -Pilih Tahun- -Pilih Bulan-

Show entries Search:

ID	Penugasan	Data Dukung	Aksi
1091	<p><i>melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 (Dana Desa dan Bantuan Keuangan) di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. (AUDIT/PEMERIKSAAN)</i></p> <p>Nomor Surat : 700.1.2/474/438.4/2024 (Detail Dasar Penugasan) Dibuat Oleh : ACHMAD RIVA ADI CHANDRA.,A.Md.Ak. pada (16-Feb-2024) - Daftar Tim Pelaksana Lama Penugasan : Jangka waktu audit selama 7 (tujuh) hari kerja pada periode tanggal 20-Feb-2024 s.d. 28-Febuari 2024</p>	<p>Nota Dinas : Unduh atau Unggah Kembali Lampiran Nota Dinas : Data belum ada, silakan Unggah Surat Tugas : Unduh Atau Unggah Kembali</p>	

log out

TEMUAN

Home / Temuan

DATA TEMUAN

-Jenis Pengawasan- 2023 -Pilih Bulan-

Show entries Search:

ID Laporan	Nomor Laporan	Temuan
1458	700/769/438.4/2023	<p>Kode Temuan / Klasifikasi : 1.00.00 (Internal) Nilai Kerugian : Rp. 33,364,400.00</p> <p>1. Terdapat Kelebihan bayar pekerjaan konstruksi senilai Rp. 33.364.400,00 (1.01.04)</p> <p>Lihat Detail</p>
1459	700/769/438.4/2023	<p>Kode Temuan / Klasifikasi : 1.00.00 (Internal)</p>

log out

LHP

Home / LHP

DATA PENGAWASAN

-Jenis Pengawasan- 2024 -Pilih Bulan-

id	Kegiatan Pengawasan	Tracking Berkas	Aksi
5	<p><i>Hasil pemeriksaan tertentu terhadap pengelolaan keuangan Desa Wirobiting Kecamatan Prambon (PKPT tahun 2021)</i></p> <p>Surat Tugas Nomor 700/1000/438.4/2021 Tanggal 20-May-2021 Hasil Kerja : Laporan Nomor 700/5886/438.4/2021 Tanggal 13-Jul-2021 (Tidak ada file) Anggaran Terperiksa : 4,443,110,271.63 Perbarui</p>		<input type="button" value="👁"/>
6	<p><i>Audit dengan tujuan tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Kec. Tarik (PKPT tahun 2021)</i></p> <p>Surat Tugas Nomor 700/1683/438.4/2021 Tanggal 14-September-2021 Hasil Kerja : Laporan Nomor 700/8141/438.4/2021 Tanggal 27-Sep-2021 (Tidak ada file)</p>		<input type="button" value="👁"/>

J. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja Tahun 2024

Kapabilitas APIP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo 61254
Telepon: (031) 8670360-2, Faksimile: (031) 8670911
E-mail: jatim@bpkp.go.id, Website: <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.09.03/LHP-635/PW13/6/2024 4 September 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Jenjang Pertama
atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Level 3 pada Inspektorat Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024

Yth. Inspektur Kabupaten Sidoarjo
di Sidoarjo

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat menyimpulkan bahwa Inspektorat berada pada "Level 3" dengan Skor "3,00"

3

sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah berada Level 3 dengan Skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.



Kepala Perwakilan, *[Signature]*

Abuh Chair
NIP. 19690403 199303 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Bupati Sidoarjo.

SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat Jln. Untung Suropati Nomor.10 Tlp.(031) 8948163 Faks.(031) 99010187
SIDOARJO - 61218

Email : inspektorat@sidoarjokab.go.id Website : inspektoratdaerah.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 13 Desember 2024

Kepada

Nomor : 700.1/3854/438 . 4/2024

Yth Sekretaris Daerah

Sifat : Penting

Kabupaten Sidoarjo

Lampiran: -

di

Perihal : Penyampaian Nilai Evaluasi AKIP Tahun
2024

SIDOARJO

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 82 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kami telah selesai melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2024 di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa nilai AKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 88,22 dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Inspektorat Daerah tetap dilakukan penilaian evaluasi AKIP, namun dalam rangka menjaga independensi nilai Inspektorat Daerah tidak disandingkan dengan OPD lain.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP197009261990031005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.


**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon (031) 8921946, 8921960, 8921853 Faks. (031) 8941145
Email: setda@sidoarjokab.go.id Website: www.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 24 Januari 2025

Nomor : 000.8.3.4/1001/438.1.3.1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi PEKPPP Tahun
2024

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten

di
Sidoarjo

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah melaksanakan Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik pada 111 unit kerja yang terdiri dari 31 Sekretariat/ Dinas/ Badan/ Inspektorat/ RSUD, 18 Kecamatan, 28 Kelurahan, 31 Puskesmas dan 3 BUMD. Adapun tujuan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik adalah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan, dan kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mendatang.

Ada tiga formulir penilaian untuk menentukan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), yaitu Formulir-01, Formulir-02 dan Formulir-03. Berikut kami sampaikan hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan dan nilai indeks pelayanan publik tahun 2024 dari **Inspektorat Daerah** yaitu **4,083** kategori **A- (Sangat Baik)**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	FORMULIR PENILAIAN	BOBOT	NILAI INDEKS
1.	Formulir-01 (Dokumen 6 Aspek)	30%	2,835
2.	Formulir-02 (Presentasi dan Wawancara)	40%	4,867
3.	Formulir-03 (Survei Kualitas Pelayanan)	30%	4,287
Nilai IPP			4,083

Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran dapat berkomitmen memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai rekomendasi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

Ditandatangani secara elektronik oleh



Dr. FENNY APRIDAWATI, S. KM. M. Kes
NIP. 196804131991032010

Dr. FENNY APRIDAWATI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Madya
NIP 196804131991032010

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Inspektorat Daerah

Periode survei : 01 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Sangat Baik

97.04

Responden

Jumlah : 1029 Orang
 Jenis Kelamin: L=627 Orang / P = 402 Orang
 Pendidikan:
 SMP= 4 Orang
 SMA= 97 Orang
 D1/D2/D3= 129 Orang
 S1= 686 Orang
 S2= 111 Orang
 Lainnya= 2 Orang

000/391/438 . 4/2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
 NIP. 197009261990031005

Inspektur Daerah

Terimakasih atas penilaian yang telah anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan Unit Kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

3.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2024 - 31 Desember 2024 dengan total 1029 responden menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **5.82**. Dengan demikian pelayanan publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori **Sangat Baik** atau dengan nilai konversi IKM sebesar **97.04**.

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari 9 unsur pelayanan, sebagaimana tersebut dalam tabel 3 di bawah ini,

Tabel 3.a Nilai SKM per Unsur pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Kategori
U1	Persyaratan	3.91	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.92	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3.92	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	3.94	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.93	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3.92	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3.94	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.92	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3.90	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur pelayanan publik dengan nilai terendah adalah pada unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, sedangkan unsur pelayanan publik dengan nilai tertinggi adalah pada unsur Persyaratan.